

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aulia, Ridho Novia, 2021, *Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang Tangerang Selatan.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Erawati, E., & Budiono, H., 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta.
- Hartono, Soenaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2013, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Korupsi pada Pemerintahan dan Korporasi*. Transmedia

Kuswanto, A., dan Saeroji, A, 2014, *Manajemen Arsip Elektronik (E ARSIP)*,

Fastindo, Semarang.

Makarim, Edmon, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum*

Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, Rajawali Pers, Jakarta.

Maryati, 2008, *Manajemen Perkantoran Efektif*, Unit Penerbit dan Percetakan

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya

Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*

Normatif dan Empiris, Pustaka Fajar, Yogyakarta.

Muhidin, S. A., dan Winata, H, 2016, *Manajemen Kearsipan*, CV Pustaka

Setia, Bandung.

Nurita, R.A. Emma, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep*

Pemikiran, Refika Aditama, Bandung.

Priansa, D., J dan Garnida, A, 2013, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien,*

Dan Profesional, Alfabeta, Bandung.

Raharjo Budi, 2003, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di*

Indonesia, dalam <http://www.budi.insan.co.id>, diunduh tanggal 15 April
2022, pukul 13.00.

Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

Sukoco, B. M., 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*,

Erlangga, Jakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Jurnal

Adjie, Habib, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan

Global, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 16 No. 2, 2017.

Engelbert, Lendo Theo, Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris

Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*,

Vol. 6, No. 1, 2021.

Erwinskyahbana, Tengku, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum*, Vol. 5, 2018.

Ghazala, Myra, “Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai

Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3, 2022.

Nisa, Naili Zahrotun, “Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris

Secara Elektronik”, *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Nyfantoro, Fajar, dkk, “Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik di

Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis”, *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, Vol. 3 No. 1, 2019.

Kuswanto, Muhammad Riza, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam

Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2 No. 2, 2017.



Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6 No. 2, 2019.

Putra, Wido Inda, “Pengelolaan Arsip Elektronik di Unit Kearsipan PT Semen
Padang”, *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol. No.
2, 2020.

Putri, Chyndiarnis Cahyaning, “Konseptualisasi Dan Peluang
Cyber Notary Dalam Hukum“, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Rifauddin, Machsun, “Pengelolaan Arsip Elektronik berbasis Teknologi”,
*Khizanah Al Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan
Kearsipan*, Vol. 4 No. 2, 2016.

Rositawati, Desy dkk, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik
Dalam Kaitan Cyber Notary”, *Jurnal Ilmiah Profi Magister
Kenotariatan*, 2018.

Smith, Leslie G, “The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce.
Information Security Institute Faculty of Information Technology”,
Thesis, Queensland University of Technology, 2006.

Sundani, Tiska, “Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta
Notaris Secara Elektronik”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 1, 2017.

Theixar, Regina Natalie, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan
Digitalisasi Akta”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6

Widiyani, Dian Sutari, “Pertanggungjawaban Notaris atas Hilang atau

Rusaknya Minuta Akta yang disimpan Akibat Bencana Alam (Studi

Kasus Tsunami di Banda Aceh)”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara,

2011.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Kepala (Arsip Nasional Republik Indonesia) ANRI Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.

D. Internet

Adi Irawan, Sofyan, “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata.”

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensidokumen-elektronik-di-persidanganperdata> , diakses pada tanggal 07 Desember 2022.